



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN/KOTA LOKASI

FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan koordinasi teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lain;
  - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, diperlukan penetapan lokasi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi pada tahun 2023;
  - c. bahwa Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk menetapkan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi setiap tahun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2023 sebagai dasar bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2023.

PERTAMA : Menetapkan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2023 mencakup seluruh 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota di 34 (tiga puluh empat) provinsi, dengan skema percepatan khusus pada 246 (dua ratus empat puluh enam) kabupaten/kota di 12 (dua belas) provinsi prioritas khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

KEDUA : ...

- KEDUA : Selain 246 (dua ratus empat puluh enam) kabupaten/kota pada 12 (dua belas) provinsi prioritas khusus dengan skema percepatan khusus, ditetapkan pula 268 (dua ratus enam puluh delapan) kabupaten/kota di 22 (dua puluh dua) provinsi prioritas dengan skema pendampingan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- KETIGA : Penetapan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
- a. upaya percepatan penurunan *stunting* yang ditargetkan sebesar 14 (empat belas) persen pada tahun 2024 memerlukan fokus khusus percepatan pada 12 (dua belas) provinsi dengan jumlah balita *stunting* dan/atau prevalensi balita *stunting* yang tinggi;
  - b. secara nasional, diestimasikan sekitar 69 (enam puluh sembilan) persen balita *stunting* nasional (3.586.556 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam) orang) terdapat di 12 (dua belas) provinsi; dan
  - c. meningkatkan kualitas upaya konvergensi penurunan *stunting* seluruh kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2023 di kabupaten/kota pada 12 (dua belas) provinsi prioritas khusus dilakukan dengan skema percepatan khusus, sebagaimana pada diktum PERTAMA, diantaranya:
- a. penguatan cakupan intervensi spesifik kunci;
  - b. pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko *stunting*;
  - c. pendampingan bagi pemerintah daerah;
  - d. pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi;
  - e. penguatan intervensi dukungan, terutama cakupan surveilans;
  - f. koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* daerah; dan
  - g. pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.
- KELIMA : Upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2023 pada kabupaten/kota di 22 (dua puluh dua) provinsi prioritas dilakukan dengan skema pendampingan, sebagaimana pada diktum KEDUA, diantaranya:
- a. penguatan cakupan intervensi spesifik kunci;
  - b. pendampingan ...

- b. pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko *stunting*;
- c. koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* daerah; dan
- d. pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 30 JUNI 2022

KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
TERINTEGRASI TAHUN 2023 DENGAN SKEMA PERCEPATAN KHUSUS

1. Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
21. Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
22. Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
24. Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
25. Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
26. Kabupaten ...

26. Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
27. Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
28. Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), Provinsi Sulawesi Barat;
29. Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
30. Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
31. Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
32. Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
33. Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
34. Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
35. Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
36. Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
37. Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
38. Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
39. Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
40. Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
41. Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
42. Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
43. Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
44. Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
45. Kota Langsa, Provinsi Aceh;
46. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
47. Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
48. Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
49. Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
50. Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
51. Kota Sabang, Provinsi Aceh;
52. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
53. Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
54. Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
55. Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
56. Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
57. Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
58. Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
59. Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

60. Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
61. Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
62. Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
63. Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
64. Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
65. Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
66. Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
67. Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
68. Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
69. Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
70. Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
71. Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
72. Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
73. Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
74. Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
75. Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
76. Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
77. Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
78. Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
79. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
80. Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
81. Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
82. Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
83. Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
84. Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
85. Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
86. Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
87. Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
88. Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
89. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
90. Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
91. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
92. Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
93. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;

94. Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
95. Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
96. Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
97. Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
98. Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
99. Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
100. Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
101. Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;
102. Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
103. Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
104. Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;
105. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
106. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
107. Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
108. Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
109. Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
110. Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
111. Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
112. Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
113. Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
114. Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
115. Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
116. Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
117. Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
118. Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
119. Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
120. Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
121. Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
122. Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
123. Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
124. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
125. Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
126. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
127. Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;

128. Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
129. Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
130. Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
131. Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
132. Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat;
133. Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
134. Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
135. Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
136. Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
137. Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
138. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
139. Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
140. Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
141. Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
142. Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
143. Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
144. Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
145. Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
146. Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
147. Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
148. Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
149. Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
150. Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
151. Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
152. Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
153. Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
154. Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
155. Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
156. Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;
157. Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
158. Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
159. Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
160. Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
161. Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

162. Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
163. Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
164. Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
165. Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
166. Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
167. Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
168. Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
169. Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
170. Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;
171. Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
172. Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
173. Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
174. Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
175. Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
176. Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
177. Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
178. Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
179. Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
180. Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;
181. Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
182. Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
183. Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
184. Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
185. Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
186. Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
187. Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
188. Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
189. Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
190. Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
191. Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
192. Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
193. Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
194. Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
195. Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
196. Kabupaten ...

196. Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
197. Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
198. Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
199. Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
200. Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
201. Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
202. Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
203. Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
204. Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
205. Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
206. Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
207. Kota Tangerang, Provinsi Banten;
208. Kota Serang, Provinsi Banten;
209. Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
210. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
211. Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
212. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
213. Kota Cilegon, Provinsi Banten;
214. Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
215. Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
216. Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
217. Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
218. Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
219. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
220. Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
221. Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
222. Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
223. Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
224. Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
225. Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
226. Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara;
227. Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
228. Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
229. Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
230. Kabupaten ...

230. Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;
231. Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
232. Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
233. Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
234. Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara;
235. Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
236. Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
237. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
238. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
239. Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
240. Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
241. Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;
242. Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
243. Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
244. Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
245. Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
246. Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 30 JUNI 2022

KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
TERINTEGRASI TAHUN 2023 DENGAN SKEMA PENDAMPINGAN

1. Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
4. Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
5. Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
6. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
8. Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
9. Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
10. Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
11. Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
12. Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
13. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
14. Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
15. Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
16. Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
17. Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
18. Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
19. Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
20. Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
21. Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
22. Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
23. Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
24. Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
25. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
26. Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
27. Kabupaten ...

27. Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
28. Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
29. Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
30. Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
31. Kota Dumai, Provinsi Riau;
32. Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
33. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
34. Kota Jambi, Provinsi Jambi;
35. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
36. Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
37. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
38. Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
39. Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
40. Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
41. Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
42. Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
43. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
44. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
45. Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
46. Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
47. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
48. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
49. Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
50. Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
51. Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
52. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
53. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
54. Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
55. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
56. Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
57. Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
58. Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;
59. Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
60. Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

61. Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
62. Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
63. Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
64. Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
65. Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
66. Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
67. Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
68. Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
69. Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
70. Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
71. Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
72. Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung;
73. Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
74. Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
75. Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
76. Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
77. Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
78. Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
79. Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
80. Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung;
81. Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;
82. Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
83. Kota Metro, Provinsi Lampung;
84. Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung;
85. Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
86. Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
87. Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
88. Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
89. Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
90. Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
91. Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
92. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
93. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
94. Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
95. Kabupaten ...

95. Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
96. Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
97. Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
98. Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
99. Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
100. Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
101. Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
102. Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
103. Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
104. Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
105. Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
106. Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
107. Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
108. Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
109. Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
110. Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
111. Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
112. Kota Denpasar, Provinsi Bali;
113. Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
114. Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
115. Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
116. Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
117. Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
118. Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
119. Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
120. Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
121. Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
122. Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
123. Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
124. Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
125. Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
126. Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
127. Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
128. Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

129. Kabupaten ...

129. Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
130. Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
131. Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
132. Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
133. Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
134. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
135. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
136. Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
137. Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
138. Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
139. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
140. Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
141. Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
142. Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;
143. Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
144. Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
145. Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
146. Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
147. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
148. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
149. Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
150. Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
151. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
152. Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
153. Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
154. Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
155. Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
156. Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
157. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
158. Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
159. Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
160. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
161. Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;
162. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;

163. Kabupaten ...

163. Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
164. Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
165. Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
166. Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
167. Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
168. Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
169. Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
170. Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
171. Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
172. Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;
173. Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
174. Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
175. Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
176. Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
177. Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
178. Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
179. Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
180. Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
181. Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
182. Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
183. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
184. Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
185. Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
186. Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
187. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
188. Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
189. Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
190. Kabupaten Jenepono, Provinsi Sulawesi Selatan;
191. Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
192. Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
193. Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
194. Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
195. Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
196. Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

197. Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
198. Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;
199. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
200. Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
201. Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
202. Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
203. Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
204. Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
205. Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
206. Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
207. Kota Ambon, Provinsi Maluku;
208. Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
209. Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
210. Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
211. Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
212. Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
213. Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
214. Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar), Provinsi Maluku;
215. Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
216. Kota Tual, Provinsi Maluku;
217. Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
218. Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
219. Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
220. Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
221. Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
222. Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
223. Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
224. Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
225. Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
226. Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
227. Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
228. Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat;
229. Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
230. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

231. Kabupaten ...

231. Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat;
232. Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
233. Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
234. Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;
235. Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
236. Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
237. Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
238. Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;
239. Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;
240. Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
241. Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua;
242. Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
243. Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua;
244. Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua;
245. Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
246. Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
247. Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
248. Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;
249. Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua;
250. Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;
251. Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
252. Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua;
253. Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;
254. Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
255. Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;
256. Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
257. Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;
258. Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
259. Kabupaten Puncak, Provinsi Papua;
260. Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;
261. Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
262. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
263. Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
264. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

- 265. Kabupaten Mappi, Provinsi Papua;
- 266. Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
- 267. Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;
- 268. Kota Jayapura, Provinsi Papua.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati